

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam tata cara peradilan di Indonesia, pembuktian adalah salah satu dari tata cara peradilan Indonesia yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum, yang didasarkan atas keyakinan hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum dan sang terdakwa itu sendiri, adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.¹ Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* mengungkapkan pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.²

¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hal : 9.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam hukum acara pidana yaitu³ :

- a) Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya yang mana hal ini diungkapkan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana;
- b) Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh ; dan
- c) Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Sebagai dasar hukum pembuktian, alat-alat bukti dalam perkara pidana terdapat dalam Pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun seiring perkembangan zaman dan perkembangan peraturan, dalam beberapa undang-undang terjadi perluasan alat bukti, misalnya pada Undang-Undang ITE dijelaskan mengenai alat bukti berupa dokumen elektronik.

Salah satu alat bukti yang sah dan yang sangat diperlukan dalam membuktikan suatu perkara pidana sekaligus yang paling menjadi sorotan masyarakat adalah keterangan saksi ahli. Banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi sekarang ini memerlukan keterangan saksi ahli dalam menyelesaikan kasus tersebut. Seorang ahli dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan membutuhkan penelaahan dan ketelitian dalam memberikan

³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hal: 250.

keterangannya, terutama untuk kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes).⁴

Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut M. Yahya Harahap merupakan salah satu kemajuan pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam analisisnya, Yahya menuliskan, melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana⁵. Lebih lanjut, mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tak dapat dipungkiri lagi, pada perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.⁶

Jika dilihat dari sejarahnya lebih jauh, lahirnya alat bukti keterangan ahli di Indonesia juga sangat terkait erat dengan perkembangan teori penghukuman dalam hukum pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menguraikan, kalau *aliran klasik* menolak sama sekali *empirical research* dan menerapkan *anecdotal method* dalam administrasi peradilan pidana, sedangkan aliran neoklasik menerapkan sebaliknya. Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran neoklasik adalah diizinkannya kesaksian ahli masuk di pengadilan guna membantu anggota juri dalam menetapkan derajat pertanggungjawaban⁷.

⁴ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003. Hal: 136

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm 275.

⁶ *Ibid.*

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010) hlm, 102.

Untuk pertama kali ahli-ahli ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial diizinkan tampil sekalipun keputusan terakhir tetap berada pada tangan juri atau hakim (dalam hal perkara tersebut diadili tanpa juri).⁸

Masuknya seorang ahli ke dalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak seorang ahli yang ingin memberikan opininya di hadapan persidangan. Di Indonesia meskipun tidak ada norma hukum yang mengatur secara tegas terkait kapan dan dalam hal apa saja seorang ahli diizinkan atau tidaknya memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan. Sepanjang dapat dilacak, penolakan tersebut umumnya didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan kapasitas dari ahli yang bersangkutan⁹.

Pada prinsipnya hadirnya pihak ketiga (ahli) ke dalam suatu proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang dibatasi. Hakim bertindak sebagai *gate keeper* atau sebagai penyeleksi untuk menilai apakah ahli tersebut mempunyai kompetensi atau tidak dalam hal membantu hakim atau juri dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga keputusan yang adil bisa ditegakkan.¹⁰

Kata “dibatasi” itu penting untuk digaris bawahi, karena apabila hakim tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan

⁸ *Ibid.*

⁹ M.yahya Harahap sebagaimana dikutip aslinya dari Lucky Raspati: *Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Suatu Kritik terhadap Pemeriksaan Ahli dalam Peradilan Pidana di Indonesia)*.

¹⁰ *Ibid.*

kekacauan dalam pemeriksaan. Seandainya hakim kurang memahami pengertian tentang suatu keadaan, dan penjelasannya hanya dapat diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, lantas hakim meminta penjelasan dari seseorang yang bukan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dijernihkan, ditinjau dari segi hukum keterangan yang seperti itu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang menurut undang-undang, karena yang memberi keterangan tidak memiliki keahlian khusus. Begitupun kalau hakim tidak memahami secara baik tujuan pemeriksaan keterangan ahli, bisa saja hasil pemeriksaan ahli tidak mempunyai nilai pembuktian¹¹. Hal tersebut tentunya bisa merugikan terdakwa atau JPU, lebih lanjut hal tersebut membuat proses peradilan menjadi tidak efisien.

Oleh karena itu, menjadi sangat relevan pendapat Yahya Harahap yang mengatakan, disamping orang yang dimintai keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli tadi, yaitu untuk membuat terang perkara pidana yang diperiksa¹², dan menemukan kebenaran materiil.

Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

¹¹ M. Yahya Harahap. *Op.cit*.hlm,277.

¹² *Ibid*.

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Merujuk pada penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Selanjutnya yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Apabila dikaitkan dengan kehadiran ahli dalam perkara pidana, terlihat bahwa saat sekarang ini kehadiran ahli dalam persidangan cenderung bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam kasus Lia Eden misalnya, Pengacara Lia Eden melakukan *walk out* ketika membela kliennya dan melaporkan majelis hakim yang diketuai Lief Sufidjullah kepada Komisi Yudisial hanya karena permintaan untuk mengganti saksi ahli ditolak majelis hakim.¹³ Boikot ini tentu menambah waktu jadwal persidangan dari jadwal seharusnya. Padahal jika kita melihat fakta yang ada, pengadilan sekarang ini sudah sangat kewalahan dalam mengatur jadwal persidangan, karena banyaknya perkara pidana yang ada.

Implikasi negatif lainnya terkait dengan kehadiran ahli dalam suatu persidangan perkara pidana adalah mahal biaya yang ditanggung oleh pihak yang menghadirkan ahli. Meskipun belum ada penelitian yang secara khusus menggali tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadirkan

¹³ Ardi Bambani Amri, “Pengacara Lia Eden Bakal Adukan Hakim ke KY”. <http://news.detik.com/read/2006/06/05/181659/609671/pengacara-lia-eden-bakal-adukan-hakim-ke-ky?nd771108bcj>, diakses pada 23 Maret 2018 pukul 14.30 WIB.

ahli kedalam suatu persidangan pidana, tetapi pada prinsipnya kehadiran seorang ahli menimbulkan biaya ekstra bagi pihak yang menghadirkannya.¹⁴

Sayangnya fenomena pelanggaran terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut tidak mendapat perhatian yang serius dari pemangku kebijakan hukum. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang yudikatif cenderung abai terhadap persoalan ini. Begitupun pemangku kebijakan legislasi. Padahal, kasus-kasus faktual yang ada seharusnya sudah cukup memberi masukan dan bahan untuk melakukan perubahan regulasi yang ada.

Dalam pembuktian kasus perkara pidana kebanyakan diantaranya juga memanfaatkan ilmu kedokteran forensik. Pemanfaatan ilmu kedokteran forensik dalam penegakan hukum serta keadilan membutuhkan dokter sebagai saksi ahli medis di persidangan. Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli diatur dalam Pasal 133 KUHAP dan dalam etika kedokteran. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 184 KUHAP) dan dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Dalam memberikan keterangan ahli, dokter harus mengikuti ketentuan yang berlaku di persidangan Indonesia, sehingga penting bagi dokter untuk mengetahui tata cara dan sikap dokter sebagai saksi ahli dan mengikuti pedoman menjadi saksi ahli kedokteran¹⁵.

¹⁴ Tri/Zae/Apr, "Karena Tidak Dibayar, Mun'im".

<http://www.hukum.online.com/berita/baca/hol4939/font-size1z>, diakses pada 23 Maret pukul 15.50 WIB.

¹⁵ Rika Susanti, *Jurnal Kesehatan Andalas: Peran dokter sebagai Saksi Ahli di Persidangan*. <http://jurnal.fk.unand.ac.id>

Keterangan ahli forensik acapkali digunakan sebagai alat bukti pada kasus-kasus perkara pidana yang pembuktiannya terbilang rumit. Misalnya saja pada kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang sempat menyita perhatian publik. Dalam kasus yang menggunakan racun sianida tersebut diperlukan ahli forensik untuk mengecek jenis sianida yang digunakan, berapa banyak kandungan di dalam tubuh orang ini, karna pengecekan tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Dengan kata lain, forensik sebagai cara untuk mengetahui penyebab matinya seseorang.¹⁶

Begitu juga dalam kasus bos PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Nasrudin Zulkarnaen, misalnya, Antasari mengajukan Peninjauan Kembali saat itu. Dengan metode forensik, itulah tim penasihat hukum Antasari menginginkan kepastian penyebab meninggalnya Nasrudin disebabkan karena satu senjata atau adanya senjata sejenis yang lainnya digunakan untuk menembak.¹⁷

Di Inggris, alat bukti ahli disebut dengan '*expert witness*' atau '*expert*'. Tidak ada perbedaan mengenai penggunaan istilah mana yang dipakai, apakah '*expert witness*' atau '*expert*'. Sama halnya dengan di Indonesia yang menggunakan istilah 'ahli' saja dalam KUHAP, namun dalam prakteknya banyak yang menggunakan istilah 'saksi ahli'. Yang dimaksud dengan '*expert witness*' adalah seseorang yang karena pendidikan, pelatihan, keahlian maupun pengalamannya, dipercaya memiliki suatu keahlian dan spesialisasi dalam suatu pengetahuan tertentu melebihi orang pada umumnya, yang memenuhi

¹⁶ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bdced68d38d/ungkap-pembunuhan-metode-forensik-mesti-ditopang-keterangan-ahli-lain>, diakses pada 22 Maret 2018 pukul 07.00 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

persyaratan dan mampu memberikan alat bukti berupa keterangannya dalam proses pembuktian pada suatu perkara pidana. Pengaturan mengenai 'expert witness' ini diatur dalam *Civil Procedure Rules* (CPR), terutama pada *Part 33* mengenai 'Expert Evidences'.¹⁸

Expert Evidence juga diatur dalam *The Criminal Law Procedure Rules* part 19.1-19.9 tentang *Expert Evidence. When this part applies* :

19.1 (1) "This part applies where a party wants to introduce expert opinion evidence."

19.1 (2) "A reference to an 'expert' in this Part is a reference to a person who is required to give or prepare expert evidence for the purpose criminal proceedings, including evidence required to determine fitness to plead or for the purpose of sentencing." (Kapan Bagian ini berlaku:

19.1 .— (1) Bagian ini berlaku di mana pihak ingin memperkenalkan bukti opini ahli.

(2) Referensi ke 'ahli' dalam Bagian ini adalah referensi untuk seseorang yang diminta untuk memberikan atau menyiapkan bukti ahli untuk tujuan proses pidana, termasuk bukti yang diperlukan untuk menentukan kebugaran untuk memohon atau untuk tujuan hukuman.)

Seorang ahli harus membantu pengadilan untuk memutus suatu perkara dengan memberikan keterangan yang objektif dan tidak ambigu dalam hal yang memasuki lingkup keahliannya. Kewajiban seorang ahli ketika akan menghadiri suatu pengadilan sebagai alat bukti ahli adalah kewajiban untuk mengesampingkan perintah atau instruksi lain dari seseorang yang membayarnya, serta jika ada perubahan dalam laporan mengenai keterangan dan pernyataan yang diberikannya, ia harus memberitahu segala pihak yang ada di pengadilan atas perubahan tersebut.

¹⁸ Jack V. Matson dkk, *Effective Expert Witnessing, Fourth Edition: Practices for the 21st Century*. CRC Press, 2004. Hal: 33

Dalam memberikan keterangannya, seorang ahli harus memberikan rincian mengenai :

- a. Kualifikasi dari ahli tersebut, pengalaman yang relevan serta akreditasinya.
- b. Mencantumkan rincian mengenai literatur atau sumber informasi lainnya yang digunakan oleh ahli tersebut dalam membuat laporannya.
- c. Mencantumkan sebuah pernyataan dari semua fakta yang diberikan yang menjadi dasar dari opini yang ada pada laporan.
- d. Memperjelas bahwa fakta yang terdapat pada laporan merupakan pengetahuan ahli tersebut sendiri.
- e. Menunjukan siapa yang melakukan pemeriksaan, pengukuran, tes ataupun percobaan lain yang digunakan oleh ahli tersebut dalam laporannya, seperti kualifikasi, pengalaman, akreditasi, siapa pengawas dalam pemeriksaan tersebut, kesimpulan, dan sebagainya.
- f. Memberikan kesimpulan dan pernyataan pribadinya berdasarkan keahlian dan pengalamannya¹⁹.

Dalam poin b dalam pasal 33.3 (1) CPR di atas, pencantuman literatur atau sumber lain yang digunakan oleh saksi ahli yang berkaitan tetap harus disertai. Hal ini dikarenakan seorang ahli harus mengemukakan keterangannya berdasarkan suatu hal yang relevan. Ia tidak diperkenankan mengemukakan pendapatnya sendiri yang tidak didasari ilmu yang sudah diuji sebelumnya. Penggunaan sumber, literatur atau doktrin yang berasal dari orang lain lantas

¹⁹ JS Publications, Experts and expert witnesses.
<http://www.ukregisterofexpertwitnesses.co.uk/AboutExpertWitnesses.cfm>, diakses pada 21 November 2017 pukul 13.25 WIB.

tidak menjadikan hal ini sebagai alat bukti lain ataupun alat bukti keterangan ahli lain yang doktrin atau pemikirannya digunakan oleh ahli yang menjadi saksi saat proses peradilan tersebut. Karena pada kenyataannya tetap ahli yang bersangkutanlah yang mengumpulkan sumber-sumber dan menganalisa dan/atau melakukan berbagai pengujian terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang sedang diproses. Dalam mengemukakan keterangannya, sama halnya dengan alat bukti saksi, ahli juga tidak diperbolehkan mengatakan mengenai opini pribadinya, hanya boleh yang berhubungan dengan keahlian dan pengetahuannya saja.²⁰

Pihak yang akan membawa seorang ahli untuk menjadi salah satu saksinya harus menunjuk ahli tersebut kepada pejabat yang mengurus perkara di pengadilan beserta pihak lawannya. Pemberitahuan ini harus dilakukan secepatnya, tidak perlu menunggu proses tertentu. Pemberitahuan dilakukan dengan melampirkan surat-surat yang dibutuhkan mengenai pemeriksaan atau tes yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang digunakan oleh ahli tersebut.²¹

Perlu dilakukan sebuah tes untuk mengetahui apakah seorang ahli memenuhi persyaratan dalam bidangnya baik dalam hal pengalaman maupun pengetahuan yang ditentukan oleh hakim dan juri. Jika ditemukan ada ketidakpahaman ahli dalam bidangnya terkait kasus yang sedang diproses,

²⁰ *Ibid*, hal 21.

²¹ Bradley J.Preber, *Financial Expert Witness Communication: A Practical Guide to Reporting and Testimony*, UK:Wiley,2014. Hal: 48

maka ahli tidak dapat diterima dalam persidangan karena dianggap kurang berkompeten.²²

Walaupun seorang ahli dibutuhkan keterangannya untuk mendapatkan bukti, tentunya masih perlu dilakukan pemeriksaan apakah pernyataannya didukung suatu teori atau dasar tertentu yang terpercaya dan relevan, dan apakah dapat diterima atau tidak. Jika tidak, akan timbul resiko bahwa pengadilan akan memberatkan pendapat ahli tersebut atas nama dirinya sendiri, dan akan dipanggil ahli-ahli lainnya yang sejenis untuk menentukan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau tidak. Hal ini sudah diakui dan disetujui oleh pengadilan-pengadilan di Inggris dalam serangkaian persetujuan, dan walaupun tidak ada percobaan umum yang secara eksplisit dinyatakan, pendekatan tersebut sudah diadopsi dari sistem pengadilan Amerika Serikat.²³

Dalam *R v Gilfoyle*, pengadilan menyatakan bahwa pendapat dari seorang ahli yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dicantumkan pada *Criminal Procedure Rules* akan dicegah untuk memasuki persidangan untuk diperdengarkan keterangannya. Peraturan mengenai saksi ahli ini sangat ketat pengaturannya karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam memutus suatu perkara. Hal ini dikarenakan mengingat beratnya beban dari keterangan yang dikemukakan oleh seorang ahli bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan diberikan pada seorang terdakwa.²⁴

²² *Ibid*, hal:49

²³ *Ibid*.

²⁴ <http://police.homeoffice.gov.uk/publications/>. Diakses pada 21 November 2017, pukul 21.00 WIB.

Di Inggris ada banyak kasus yang juga menggunakan ahli forensik dalam mengungkap suatu kasus pidana, misalnya saja dalam kasus pembunuhan Stephen Lawrence. Para ilmuwan yang bekerja di LGC Forensics di Inggris menemukan serat pakaian dan rambut dari remaja tersebut pada pakaian dari dua pembunuh, Gary Dobson dan David Norris. Rambut yang ditemukan pada celana jeans David Norris ternyata cocok dengan profil DNA Stephen. Tanda darah pertama muncul saat para ilmuwan menggunakan alat yang disebut *microspectrophotometer* untuk mendeteksi warna salah satu serat pada jaket Dobson. Mereka memutuskan memakai sisa jaket dengan menggunakan mikroskop yang diperbesar 40 kali. Sebuah titik darah 0,5 mm x 0,25 mm ditemukan di sekitar kerah jaket, dan itu juga cocok dengan DNA Stephen.²⁵

Di masa lalu, tes DNA pada sampel darah dan sehelai rambut seperti itu masih sangat jarang digunakan sehingga para ahli forensik biasanya tidak akan memeriksa dan menyelidiki di tempat kejadian pertama. Teknik forensik baru santer digunakan pada tahun 2000 dan sangat membantu LGC mengantongi bukti vital dan klaim bahwasanya pakaian tersebut kemungkinan telah terkontaminasi.

Penggunaan sampel darah dan DNA tersebut dalam mengungkap kasus perkara pembunuhan juga bekerja pada kasus Joanna Yeates. Ahli forensik membantu dalam meningkat sampel DNA yang lemah yang ditemukan

²⁵ <http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/16409283/how-forensics-solved-stephen-lawrence-murder>, diakses pada 22 Maret 2018 pukul 08.00 WIB.

dengan tubuhnya dan menghubungkan pembunuhan itu dengan Vincent Tabak yang menjadi tersangka.²⁶

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Inggris. Maka dari itu penulis tertarik untuk membandingkan dan melakukan penelitian tentang : **“STUDI KOMPARATIF KETERANGAN AHLI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN SISTEM HUKUM INGGRIS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian :

1. Bagaimana aturan hukum tentang keterangan ahli forensik di Indonesia dan di Inggris?
2. Apa persamaan dan perbedaan penerapan keterangan ahli forensik menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris ?

²⁶ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai keterangan ahli forensik sebagai alat bukti di Indonesia dan di Inggris.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Memperkaya wawasan di bidang hukum acara pidana terutama yang berhubungan dengan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti yang sah.
 - b. Sebagai pengetahuan tambahan yang bermanfaat untuk dibaca dan dipahami khususnya mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.

- c. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.

2. Secara praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca mengenai aturan hukum serta penerapan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh Karena itu, kerangka teoritis dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan.

Untuk mengetahui penggunaan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti guna kepentingan persidangan maka teori yang diperlukan adalah teori pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan

pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “preponderance of evidence”, yaitu bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih dapat dipercaya jika dibandingkan dengan bukti lainnya atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti maksudnya seseorang hanya dapat dikatakan bersalah tanpa ada keraguan sedikitpun akan kebenaran dakwaan (beyond reasonable doubt).²⁷

Penegakan hukum membutuhkan instrument-instrumen yang disebut juga dengan aparaturnya yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang terdiri atas empat subsistem, yang menurut mardjono²⁸ empat subsistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang diharapkan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.

²⁷ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang education, 2013, hlm 241.

²⁸ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, Ctk. ke-2, Hlm. 2.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.²⁹

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”* Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.

²⁹ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm, 10.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2. Kerangka konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya :

a. Komparatif

Komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya³⁰.

b. keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan³¹.

c. Forensik

Forensik (berasal dari bahasa latin Forensis yang berarti “dari luar”, dan serumpun dengan kata forum yang berarti “tempat umum”) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains³².

d. Alat Bukti

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai

³⁰ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komparatif-dan-contohnya/>
diakses 15 Desember 2017 pukul 19.00 WIB.

³¹ Andi hamzah, *KUHP DAN KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, Ctk. ke-17, hlm. 233.

³² <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 17 Januari 2018 pukul 18.08 WIB.

bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa³³.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dapat berupa :

1. Jenis penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁴ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

a) Penelitian terhadap asas-asas hukum

³³ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html?m=1>
diakses pada 15 Desember 2017 pukul 20.15 WIB.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Hlm. 44.

b) Penelitian terhadap sistematik hukum

c) Perbandingan hukum

d) Sejarah hukum

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah perbandingan hukum yang membandingkan antara keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Inggris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.³⁵

Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan suatu perbandingan tentang keterangan ahli

³⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 123.

forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti tulisan-tulisan ilmiah dan sumber tertulis lainnya, jurnal-jurnal hukum, buku-buku, literatur, dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶ Karena penelitian ini bersifat normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, jurnal, arsip dan literatur

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 91.

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Criminal Procedure Rules

b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya :

- 1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini
- 2) Kamus hukum (Black's Law Dictionary).

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis

dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, perbandingan keterangan ahli forensik akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan peraturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui aturan hukum keterangan ahli forensik sebagai alat bukti baik di Indonesia maupun di Inggris serta persamaan dan perbedaan penerapan keduanya.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus). Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut

Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual.

